

Kebijakan Jepang dalam Industri Perikanan Pasca Bencana Alam Tahun 2011 (*Japan's Policies in Fishery Industry after Natural Disasters in 2011*)

Fithria Purnamasari, Sri Yuniati, Adhiningasih P.
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember, Kotak Pos 159
E-mail: fitri.apries@gmail.com, adhiningp@gmail.com, s.yuniati@rocketmail.com

Abstract

Japan's fishery industry is an industry that is guaranteed by the Government of Japan. The fishery industry can maintain a stable production level each year. However, a decline in production and export value of the fishery industry occurred in 2011. This was triggered by the natural disasters that struck Japan in 2011. Japan suffered material and non-material losses. This study will examine the factors and the reasons of Japanese policy in fishery industry after natural disasters in 2011. This study used David Easton Political System Model concept and Public Policy concept from James E. Anderson to answer the question on what policy Japanese government made for fishery industry after natural disasters in 2011. Methodologically, this study used descriptive research method, from 2011 to 2014. This paper concludes that the Japanese government's policies in fishery industry after natural disasters occurred in 2011 were mitigation, reconstruction, and revitalization.

Keywords: *Japan, public policy, fishery industry, reconstruction, revitalization.*

Pendahuluan

Perairan laut Jepang menghasilkan sumber daya alam yang cukup melimpah karena lautan di sekitar Jepang memiliki ekosistem dan potensi yang mendukung kehidupan lautnya. Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah China, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chile (Grainger, 2013). Kegiatan industri perikanan yang aktif di Jepang terdapat di pesisir pantai dan lepas pantai. Sepertiga dari total produksi dalam industri perikanan nasional Jepang merupakan hasil dari

industri perikanan yang dilakukan di pesisir pantai. Lebih dari separuh total produksi dalam industri perikanan Jepang merupakan hasil dari kegiatan industri perikanan yang dilakukan di lepas pantai. Industri perikanan yang berjenis perikanan lepas pantai melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal-kapal yang beroperasi meluas ke daerah Zona Ekonomi Eksklusif Jepang. Hasil laut yang diambil antara lain yaitu ikan sarden, ikan cakalang, kepiting, udang, ikan salem, cumi-cumi, kerang, ikan tuna, ikan saury, ikan yellowtail, dan ikan makerel (Enciclopedia, 2014).

Kebijakan Pemerintah Jepang mendukung penuh perkembangan industri perikanan di Jepang. Hal ini disebabkan karena sektor industri perikanan merupakan salah satu faktor bagi negara Jepang untuk menjadi negara maju selain sektor industri otomotif, elektronik, dan pertanian. Hal tersebut mendorong Pemerintah Jepang untuk mengembangkan industri perikanan secara komprehensif dan mempromosikan peningkatan sektor industri perikanan secara terus-menerus. Jadi, industri perikanan di Jepang merupakan industri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional Jepang dalam proses pelaksanaan dan pengembangannya. Oleh karena itu, industri perikanan dapat menjaga tingkat produksi yang stabil tiap tahun.

Namun demikian, terjadi bencana alam tsunami, gempa bumi, dan insiden di Fukushima Daiichi yang berdampak pada industri perikanan di Jepang pada tahun 2011. Kerusakan dan kerugian besar terjadi pada fasilitas-fasilitas industri perikanan di Jepang khususnya yang berada di sekitar perairan Pasifik, yaitu dari wilayah Hokkaido sampai Chubu.

Selain itu, kerusakan reaktor nuklir mengakibatkan terkontaminasinya sejumlah ikan dengan radioaktif nuklir yang tercemar ke perairan Jepang sehingga ikan-ikan tersebut tidak dapat diekspor keluar negeri dan tidak dapat dikonsumsi di dalam negeri. Meskipun demikian, penurunan pada sektor industri perikanan tersebut tidak menghambat Jepang untuk segera bangkit kembali.

Kondisi area dan fasilitas-fasilitas industri perikanan yang terkena dampak bencana alam telah membaik dan Jepang telah mengalami peningkatan dalam nilai total ekspor produksinya pada tahun 2013. Total nilai ekspor produksi industri perikanan Jepang pasca terjadinya bencana alam 2011 adalah 174.100.000.000 yen dan berada pada titik terendah pada tahun 2012 yaitu hanya mencapai 169.816.000.000 yen. Nilai total ekspor produksi industri perikanan Jepang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013, yaitu 221.642.000.000 yen dan semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi 233.672.000.000 yen (MAFF, 2012).

Dari uraian di atas, artikel ilmiah ini hendak menjelaskan tindakan Jepang dalam industri perikanan pasca bencana alam tahun 2011 dan menilai efektifitas dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Kerangka Konseptual

Teori merupakan penjelasan tentang mengapa sesuatu dapat terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari suatu prediksi (Mas'ood, 1994:195).

Supaya dapat memahami studi kasus dalam artikel ilmiah ini penulis menggunakan beberapa konsep yaitu konsep *Political System Model* dan konsep *Public Policy* (Kebijakan Publik):

1. Political System Model

Suatu keputusan atau kebijakan tidak akan ada kecuali melalui proses pembuatan keputusan (*decision making process*). Konsep proses pembuatan keputusan dengan pendekatan model sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton terdiri dari elemen yang terdapat di dalam sistem politik (*political system*) berupa unit-unit yang menyusun sistem tersebut yaitu tindakan-tindakan politik (Easton, 1957: 385). Dalam tulisan ini, sistem yang dimaksud adalah sistem politik terkait tindakan Pemerintah Jepang dalam proses pembuatan kebijakannya mengenai industri perikanan pasca bencana alam tahun 2011. Tindakan politik tersebut terjadi karena adanya *inputs*. *Inputs* dalam sistem politik terkait tindakan Pemerintah Jepang dalam proses pembuatan kebijakannya mengenai industri perikanan adalah karena adanya perubahan/ tuntutan lingkungan dan masalah yang muncul akibat bencana alam tahun 2011 yang mempengaruhi industri perikanan di Jepang. Sedangkan *output* yang ingin dicapai adalah pemulihan industri perikanan di Jepang agar menjadi normal kembali.

Input terkait dampak bencana alam tahun 2011 terhadap industri perikanan di Jepang mendorong terjadinya *demands* untuk pemulihan pasca bencana. Selain *demands*, *supports* juga diperlukan agar sistem dapat terus berjalan sehingga tujuan akhir dapat dicapai. Menurut David Easton, *supports* memberikan dukungan pada sistem melalui hubungan antara tiga hal, yaitu masyarakat, rezim, dan pemerintah (Easton, 1957: 392). Masyarakat Jepang khususnya yang terkait dengan

industri perikanan memberikan dukungan penuh pada pemerintah untuk mengadakan kebijakan mengenai industri perikanan pasca bencana alam tahun 2011. Masyarakat dalam komunitas industri perikanan tersebut menginginkan pemulihan kehidupan karena kesejahteraan ekonomi mereka sangat bergantung pada industri perikanan. Sebaliknya pemerintah juga memerlukan masyarakat untuk memberikan bantuan dalam kegiatan-kegiatan terkait pemulihan industri perikanan pasca bencana alam tersebut. Berhasil atau tidaknya Pemerintah Jepang dalam memberikan hasil akhir yang diinginkan oleh masyarakat akan mempengaruhi rezim pemerintahan. Jika berhasil, maka legitimasi masyarakat kepada Pemerintah Jepang akan meningkat.

Proses pembuatan kebijakan dilakukan oleh pemerintah/para pembuat kebijakan dengan adanya *demands* dan *supports* akibat bencana alam di Jepang pada tahun 2011. Adanya tekanan untuk segera mengatasi bencana alam yang terjadi semakin mendorong *demand* menjadi lebih besar dan mendesak sehingga Pemerintah Jepang harus segera membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengatasi dan memulihkan keadaan di Jepang pasca terjadinya bencana alam. Pemerintah Jepang perlu memulihkan keadaan pasca bencana alam sehingga kehidupan masyarakat Jepang dapat kembali normal (*life recovery*).

Umumnya, manajemen bencana alam internasional terdiri dari 4 komponen, yaitu adanya

respon sebagai bentuk pertolongan pertama pasca bencana alam yang terjadi, melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi yang merupakan proses revitalisasi pemulihan pasca bencana alam, serta melakukan pencegahan/mitigasi sebagai bentuk keadaan siap-siaga jika terjadi bencana alam di waktu yang akan datang (Platt, 2015: 1). Manajemen bencana alam bertujuan untuk mengurangi atau menghindari potensi kerugian dari resiko bencana alam, menjamin adanya bantuan/pertolongan yang cepat dan pantas bagi para korban bencana alam, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif pasca bencana alam. Berdasarkan manajemen bencana alam internasional tersebut, kebijakan Pemerintah Jepang terkait penanggulangan sebelum atau sesudah bencana alam secara umum telah diatur dalam sistem manajemen bencana alam Jepang (*Japan disaster management system*). Hal tersebut diatur di dalam *The Disaster Countermeasures Basic Act* yang diberlakukan mulai tahun 1962 (Kazusa, 2011: 1). Undang-undang ini memberikan fondasi dasar bagi perumusan langkah-langkah penanggulangan bencana di Jepang. Berdasarkan *The Disaster Countermeasures Basic Act*, manajemen bencana alam di Jepang dilakukan dengan tahap-tahap tindakan tanggap darurat bencana, rekonstruksi, revitalisasi, dan pencegahan bencana alam pasca bencana tersebut terjadi.

Sistem manajemen bencana alam di Jepang merupakan tindakan kolektif karena terdiri dari tindakan berbagai aktor pemerintahan dan masyarakat yang saling berbagi tanggungjawab

dalam bencana alam skala nasional. Tindakan kolektif diperlukan karena manajemen bencana alam yang efektif memerlukan tindakan-tindakan yang terkoordinasi antara sektor-sektor yang terkait di dalamnya.

2. *Public Policy* (Kebijakan Publik)

Ciri-ciri umum dari kebijakan menurut James E. Anderson antara lain (Anderson, 2014: 7):

- a. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
- b. *Public policy consists of courses of action rather than separate, discrete decision, or actions performed by government officials.* Artinya, kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak terpisah dari kebijakan yang lainnya.
- c. *Policy is what government do (not what they say will do or what they intend to do).* Artinya, kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may either negative or positive.* Artinya, kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan dapat berupa pengarah untuk melaksanakan/menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Artinya, kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga mempunyai

kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.

Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang terjadi. Penulis menggunakan data-data sekunder dalam mengumpulkan data untuk penulisan karya ilmiah ini. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel di media massa, artikel ilmiah, dan berbagai informasi yang ada di internet.

Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah Jepang dalam memulihkan industri perikanan pada tahun 2011 memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri umum kebijakan publik menurut James E. Anderson. Adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara kebijakan Pemerintah Jepang dalam melakukan tindakan rekonstruksi, revitalisasi, dan pencegahan tersebut membenarkan pendapat James E. Anderson. Keterkaitan antara kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang tersebut merujuk pada pendapat James E. Anderson bahwa kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak terpisah dari kebijakan yang lainnya. Selain itu, Pemerintah Jepang dalam melaksanakan tindakan-tindakan rekonstruksi, revitalisasi, dan pencegahan juga sesuai dengan pendapat James E. Anderson bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan. Tujuan Pemerintah Jepang dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang tercantum di dalam kebijakan-

kebijakan tersebut adalah untuk memulihkan sektor industri perikanan.

Tindakan rekonstruksi, revitalisasi, dan pencegahan yang tercantum di dalam kebijakan *Fisheries Recovery Master Plan*, *Basic Disaster Recovery Policy for the Great East Japan Earthquake*, dan *Basic Policy and Action Plan for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries* merupakan kebijakan yang segera direalisasikan oleh Pemerintah Jepang sejak tahun 2011 dan bukan sekedar wacana. Hal ini juga membenarkan pendapat James E. Anderson bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.

Selain itu, James E. Anderson berpendapat bahwa ciri umum kebijakan publik adalah kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan. Hal ini juga terdapat pada kebijakan Pemerintah Jepang dalam memulihkan industri perikanan di tahun 2011 yaitu larangan melakukan operasi penangkapan ikan di area *fishing grounds* yang sampelnya tidak lulus uji inspeksi radioaktif, melarang produk perikanan yang melewati ambang radioaktif untuk didistribusikan ke pasar, dan melarang aktivitas penangkapan ikan di area perairan di prefektur Fukushima dan sekitarnya yaitu dalam radius 12 mil di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima (FaWW, 2011: 2).

Semua tindakan Pemerintah Jepang yang tercakup dalam kebijakan-kebijakan yang dijelaskan pada artikel ilmiah ini dilandasi dengan

hukum yang tercantum di dalam *Basic Law on Fisheries Policy* yang telah dipublikasikan sejak tahun 2001. *Basic Law on Fisheries Policy* menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat terkait industri perikanan di Jepang harus didasari dengan dua prinsip dasar, yaitu untuk menjaga stabilitas suplai produksi perikanan dan mengembangkan industri perikanan di Jepang menjadi lebih baik (MAFF, 2007: 1). Hal ini juga sesuai dengan pendapat James E. Anderson tentang ciri umum kebijakan publik yang terakhir, yaitu kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang melalui tindakan rekonstruksi dan revitalisasi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proses rekonstruksi diperlukan untuk menunjang proses revitalisasi sehingga kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dapat kembali normal. Tanpa rekonstruksi, tidak akan ada revitalisasi (Hayashi, 2007: 416). Rekonstruksi kota atau area terdampak merupakan pemulihan fisik yang menjadi alat bagi terjadinya revitalisasi ekonomi lokal sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca bencana alam. Revitalisasi ekonomi kemudian dapat membantu pemulihan kehidupan korban bencana alam. Oleh karena itu, tindakan rekonstruksi dan revitalisasi merupakan hal yang tetap dalam usaha pemulihan pasca bencana alam. Selain rekonstruksi dan revitalisasi juga diperlukan adanya tindakan pencegahan untuk mencegah dampak yang lebih besar dari bencana alam yang

dapat terjadi di masa yang akan datang.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam industri perikanan pasca bencana alam tahun 2011 adalah berupa tindakan-tindakan pencegahan (mitigasi), rekonstruksi, dan revitalisasi.

1. Tindakan Pencegahan atau Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (P2MB, 2010). Tindakan pencegahan atau mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang tercantum di dalam *Basic Disaster Policy for the Great East Japan Earthquake (Basic Policy)*. Tindakan ini dilakukan agar dapat menghindari atau meminimalisir dampak pada industri perikanan di Jepang di masa yang akan datang jika terjadi bencana alam yang serupa.

Basic Disaster Policy for the Great East Japan Earthquake (Basic Policy) merupakan kebijakan yang disusun oleh *Cabinet Reconstruction Headquarters* sebagai respon terkait dampak bencana alam yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011. Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2011 dan berfungsi untuk memulihkan Jepang pasca bencana alam pada berbagai sektor (MAFF, 2012). Salah satunya adalah sektor industri perikanan. Kebijakan dalam *Basic Policy* yang terkait sektor industri perikanan berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu

Fishery Recovery Master Plan. Isi dari *Basic Policy* yang terkait dengan tindakan pemulihan industri perikanan pasca bencana alam 2011 terdapat pada poin ke-5 mengenai kebangkitan industri dan poin ke-6 mengenai rekonstruksi dan pengembangan infrastruktur (Morichi, 2011: 18).

Kebijakan yang terdapat pada poin ke-5 mengenai kebangkitan industri bertujuan untuk memulihkan kembali industri perikanan yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Pemulihan industri perikanan dilakukan dengan cara pengembangan dermaga dan pelabuhan perikanan, industri pemrosesan produk perikanan, dan pengenalan sistem manajemen sumber daya modern. Pengembangan terkait pelabuhan perikanan, industri pemrosesan produk perikanan dan pengenalan sistem manajemen sumber daya telah dijelaskan pada *Fisheries Recovery Master Plan*. Selain itu, industri perikanan harus dimodernisasi dengan “*holiday system*” yaitu mengadakan suatu musim dimana kegiatan penangkapan ikan dilarang sehingga tidak terjadi eksploitasi penangkapan ikan yang berlebihan (Morichi, 2011: 18).

Kebijakan yang terdapat pada poin ke-6 mengenai rekonstruksi dan pengembangan infrastruktur bertujuan untuk memperkuat ketahanan fasilitas-fasilitas industri perikanan terhadap bencana alam (Morichi, 2011: 18). Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Memperkuat struktur pelabuhan perikanan, jalan arteri, jembatan, dan terowongan yang terhubung ke pelabuhan sehingga tahan terhadap

gempa bumi. Selain itu, struktur pelabuhan perikanan dan pemecah gelombang juga perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kekuatan gelombang tsunami. Pembangunan pemecah gelombang yang baru diperkuat dengan sistem multi tanggul sehingga dapat dilakukan pencegahan tsunami mencapai area perkotaan. Pemerintah Jepang juga merekonstruksi tatanan *fishing village* dengan harapan dapat meminimalisir dampak bencana alam di masa yang akan datang.

b. Meninggikan pelabuhan perikanan sehingga kedalaman air menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kapal-kapal besar yang ditambat di dermaga terbawa arus pada saat terjadi tsunami.

c. Meningkatkan sistem peringatan tsunami dan evakuasi bagi pekerja asing. Peringatan tsunami yang berada di area pelabuhan perikanan biasanya menggunakan bahasa Jepang dan sebagian pekerja asing tidak dapat memahaminya. Supaya menghindari hal ini, maka diciptakan sistem peringatan tsunami yang lebih internasional dengan menggunakan sirene sebagai instruksi evakuasi.

2. Tindakan Rekonstruksi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata rekonstruksi memiliki arti pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Pemerintah Jepang bekerjasama dengan masyarakat melakukan tindakan rekonstruksi untuk membangun kembali bangunan-bangunan

dan sarana prasarana yang hancur akibat bencana alam tersebut (KBBI, 2012). Estimasi biaya untuk rekonstruksi wilayah Jepang yang terdampak bencana adalah sekitar 3 triliun yen (GoJ, 2012: 10). Tindakan rekonstruksi yang dilakukan tercantum di dalam kebijakan *Fishery Recovery Master Plan*.

Fisheries Recovery Master Plan disusun oleh *Fisheries Agency* dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan nasional Jepang dimulai pada tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan rekomendasi dari *Reconstruction Design Council in Response to the Great East Japan Earthquake* (MAFF, 2012). *Fisheries Recovery Master Plan* merupakan kebijakan yang berupa tindakan-tindakan rekonstruksi yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai macam sektor yang berhubungan langsung dengan industri perikanan di Jepang. Tindakan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dibagi menjadi 2 macam, yaitu rekonstruksi fisik dan non-fisik. Tindakan rekonstruksi fisik adalah pembangunan kembali dan merenovasi bangunan dan fasilitas yang berhubungan dengan industri perikanan di Jepang yang mayoritas hancur akibat terkena dampak bencana alam. Sedangkan rekonstruksi non-fisik adalah pemulihan kembali keadaan industri perikanan yang saat itu melemah. Rekonstruksi non-fisik diperlukan agar dapat menyusun kembali industri perikanan di Jepang sehingga dapat berfungsi normal kembali. Jadi, rekonstruksi fisik adalah rekonstruksi yang lebih menekankan pada kebutuhan biaya untuk perbaikan, sedangkan

rekonstruksi non-fisik lebih menekankan pada bagaimana caranya agar industri perikanan dapat berfungsi seperti sebelumnya. Meskipun berbeda, kedua bentuk rekonstruksi tersebut saling terkait dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Rekonstruksi non-fisik tidak dapat dilakukan tanpa adanya rekonstruksi fisik. Begitu sebaliknya, rekonstruksi fisik tidak dapat memulihkan industri perikanan tanpa adanya rekonstruksi non-fisik. Rekonstruksi fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam memulihkan industri perikanan pasca bencana alam 2011 merupakan hal yang menjadi poin-poin penting dalam *Fisheries Recovery Master Plan*. Implementasi kebijakan yang tercantum di dalam *Fisheries Recovery Master Plan* yaitu:

a. Menata kembali peran dan fungsi operasional pelabuhan perikanan di masing-masing *fishing village* yang terdampak bencana alam 2011. Jumlah pelabuhan perikanan yang terdampak sebanyak 319, yaitu sekitar 113 km pelabuhan terdampak bencana alam 2011. Rekonstruksi dan pemulihan fungsi pelabuhan perikanan sebanyak 40% yang berlokasi di Prefektur Iwate, Fukushima, dan Miyagi selesai pada akhir 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 berikutnya dilanjutkan pada perbaikan bagi pelabuhan perikanan yang mengalami kerusakan paling parah yaitu yang berlokasi di Prefektur Hokkaido, Aomori, dan Chiba (MAFF, 2012). Selain rekonstruksi, fungsi distribusi dan pemrosesan yang ada di area pelabuhan

- ditingkatkan dengan menggunakan sistem HACCP.
- b. *Fishing communities* bersama Pemerintah Jepang saling membantu membersihkan sisa puing-puing yang terdapat di area *fishing grounds* pasca bencana alam. Hal ini menjadi prioritas bersama karena area *fishing grounds* berkaitan langsung dengan ekosistem dan sumber daya laut yang ada di dalamnya sehingga dapat segera dilakukan aktifitas terkait industri perikanan kembali.
- c. Mengenalkan sistem kolaborasi operasi penangkapan ikan antar prefektur dengan menggunakan *fishing vessels* yang ada secara bersama-sama. Selain perubahan pada tingkat operasionalnya, dilakukan perbaikan-perbaikan bagi *fishing vessels* yang mengalami kerusakan akibat dari bencana alam yang terjadi. Terdapat kurang lebih 29.000 *fishing vessels* yang terdampak mengalami kerusakan dan 70% dari jumlah *fishing vessels* yang rusak tersebut telah selesai diperbaiki pada akhir 2012 (MAFF, 2012).
- d. Fasilitas akuakultur rumput laut Wakame di Prefektur Iwate sebelum bencana alam terjadi adalah 12.000 dan 50% dari jumlah yang terdampak telah dibangun kembali pada akhir 2012. Fasilitas akuakultur wakame di Prefektur Miyagi sebelum bencana alam terjadi adalah 24.000 dan 60% dari jumlah yang terdampak telah dibangun kembali pada akhir 2012. Fasilitas akuakultur Coho Salmon di Prefektur Miyagi sebelum bencana alam terjadi adalah 300 dan 70% dari jumlah yang terdampak telah dibangun kembali pada akhir 2012. Terakhir adalah fasilitas akuakultur nori di Prefektur Miyagi yang sebelum bencana alam terjadi berjumlah 51.000 sudah dibangun kembali sebesar 40% dari jumlah yang terdampak pada akhir tahun 2012 (MAFF, 2012).
- e. Sebanyak 34 pasar grosir perikanan di area produksi Prefektur Iwate, Miyagi, dan Fukushima terkena dampak bencana alam 2011. Total 22 fasilitas di Prefektur Miyagi dan Iwate telah beroperasi kembali pada bulan September 2012. Berdasarkan sumber dari *National Federation of Processed Fisheries Products Cooperatives*, sebanyak 958 fasilitas pemrosesan produk perikanan di Prefektur Iwate, Miyagi, dan Fukushima mengalami kerusakan pasca bencana alam (MAFF, 2013).
- f. Pemerintah Jepang melalui organisasi-organisasi yang terdapat dalam struktur manajemen industri perikanan di Jepang mengedepankan koordinasi antara nelayan lokal dan pelaku bisnis privat yang terkait dengan perikanan, seperti kedai *seafood*, industri perumahan yang mengolah hasil laut dalam skala kecil, industri pemrosesan produk perikanan, dan lain-lain.
- g. Pemerintah Jepang mengembangkan *fishing communities* yang tahan terhadap bencana alam. Selain itu, Pemerintah Jepang juga mengembangkan “*sixth industry*” terkait industri perikanan. *Sixth industry*” merupakan usaha untuk menciptakan nilai tambah yang baru dengan menggunakan sumber daya lokal secara

luas dan terintegrasi. Pengembangan “*sixth industry*” dilakukan dengan cara memajukan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai industri primer, produksi perikanan sebagai industri sekunder, dan pemasaran sebagai industri tersier (Suishanco, 2012: 29). “*Sixth industry*” memiliki 6 bentuk pengembangan yang ada pada *fishing community*. Enam bentuk tersebut antara lain pemanfaatan budaya masyarakat lokal untuk menarik minat pengunjung, peningkatan industri pemrosesan produk perikanan, pengembangan bisnis perhotelan dan penginapan, bisnis pariwisata, bisnis rekreasi laut, dan bekerjasama dengan NPOs (*Non-Profit Organizations*) dengan mengadakan acara yang dapat menarik pengunjung.

h. Terkait adanya kebocoran radiasi akibat insiden di reaktor nuklir Fukushima, maka Pemerintah Jepang melakukan respon dan memperkuat usahanya untuk mengatasi dampak insiden tersebut terhadap industri perikanan di Jepang. Inspeksi dilakukan di berbagai wilayah Jepang demi menjaga keamanan pangan, air minum, dan produk-produk industri lainnya. Industri perikanan di Jepang juga tidak luput dari inspeksi. Pada tanggal 5 April 2011, Pemerintah Jepang menetapkan standar radiasi untuk industri perikanan (FaWW, 2011: 2). Kemudian pada tanggal 6 Mei 2011, *Fisheries Agency* menetapkan “*Basic Policy for Inspections on Radioactive Materials in Fishery Products*” dan memperkuat tindakan pengawasan serta

menyediakan informasi yang akurat terkait level kontaminasi radioaktif (DGIP, 2013: 50). Hal tersebut dilakukan karena produk-produk industri perikanan dikonsumsi oleh masyarakat Jepang dan internasional sehingga perlu dipastikan keamanannya untuk dikonsumsi manusia. Implementasi inspeksi level radioaktif pada produk-produk perikanan dilakukan di Prefektur Fukushima, Tochigi, Gunma, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, area PLTN Fukushima Daiichi, area PLTN Fukushima Daini, dan perairan di sekitarnya. Inspeksi tersebut dilakukan oleh institusi-institusi yang terkait dengan keamanan produk-produk industri, seperti Nippon Kaiji Kentei Kyokai (*International Inspection & Surveying Organization*), SK (*Shin Nihon Kentei Kyokai*), dan ANCC (*All Nippon Checkers Corporation*). Pemerintah Jepang meneruskan pengadaan inspeksi bahan radioaktif pada produk-produk laut. Selain itu, Pemerintah Jepang melarang aktivitas penangkapan ikan di area perairan di prefektur Fukushima dan sekitarnya yaitu dalam radius 12 mil di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima karena dikhawatirkan perairan dan ekosistemnya tercemar oleh bahan radioaktif (FaWW, 2011: 2).

3. Tindakan Revitalisasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata revitalisasi memiliki arti proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Tindakan revitalisasi yang dilakukan oleh

pemerintah Jepang tercantum dalam *The Basic Policy and Action Plan for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries* yang merupakan hasil keputusan dari *Headquarters for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries*. Kebijakan *Basic Policy and Action Plan for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries* dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 pasca terjadinya bencana alam di Jepang (HRJFAFF, 2011: 12). Kebijakan ini diperlukan untuk mengembalikan stabilitas produksi industri makanan, agrikultur, kehutanan, dan perikanan di Jepang yang saat itu menurun akibat terkena bencana alam.

Basic Policy and Action Plan for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries memiliki 7 strategi yang digunakan dalam rangka merevitalisasi industri-industri yang bersangkutan (industri pertanian, kehutanan, dan perikanan). Strategi untuk merevitalisasi industri perikanan disebutkan pada strategi ke-5, yaitu menciptakan industri perikanan yang menarik melalui modernisasi dan manajemen sumber daya (HRJFAFF, 2011: 13). Pemerintah Jepang dalam tindakannya merevitalisasi industri perikanan mengadakan kebijakan sesuai yang tercantum pada strategi ke-5 yaitu:

- a. Memperkenalkan *fishing vessels* yang memiliki performa yang lebih baik, lebih efisien energi, dan lebih murah.
- b. Generasi nelayan masa depan yang aktif harus ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan dan menyesuaikan para pencari kerja dengan keadaan *fishing community* dan mendorong latihan kerja jangka panjang. Pencari kerja dengan *skill* tertentu ditempatkan pada bidang pekerjaan yang dikuasai sehingga proses kerjanya dapat lebih efektif dan produktif.

- c. Kerjasama antar orang-orang yang bekerja dalam industri perikanan dan *fishing village* dalam tujuannya menstruktur ulang organisasi mereka dan proyeknya masing-masing. Dengan demikian, mereka akan dapat berperan aktif dalam industri perikanan lokal di tempatnya masing-masing sehingga menjadi lebih maju.
- d. Kerjasama antara distributor dan fasilitas pemrosesan dari industri perikanan untuk menjaga stabilitas persediaan dan keamanan makanan produk laut dengan mengontrol kualitasnya dengan menggunakan sistem HACCP.

Hasil dari tindakan dan kebijakan Pemerintah Jepang tersebut kemudian dapat diketahui efektifitasnya dengan melihat perkembangan industri perikanan di Jepang pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2011.

Pada tahun 2012, nilai ekspor produksi perikanan Jepang mengalami penurunan karena masih berlakunya larangan dari negara lain yang menolak produksi perikanan Jepang akibat pencemaran radioaktif Fukushima Daiichi yang terjadi di tahun sebelumnya. Meskipun total produksinya mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, peningkatan pada volume

ekspor menunjukkan bahwa Jepang dapat segera bangkit pasca bencana alam yang terjadi di tahun 2011. Total volume ekspor produksi perikanan Jepang meningkat menjadi 440.000 ton dengan nilai ekspor 170 milyar yen pada tahun 2012 (MAFF, 2012).

Selain itu, nilai total ekspor produksi industri perikanan di Jepang kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu mencapai 221.642.000.000 yen dan kembali meningkat pada tahun 2014 yaitu menjadi 233.672.000.000 yen (MAFF, 2015). Perkembangan nilai total ekspor produksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Jepang efektif dalam memulihkan industri perikanan pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2011.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Kebijakan Jepang dalam Industri Perikanan Pasca Bencana Alam tahun 2011”, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Jepang melakukan tindakan-tindakan pencegahan, rekonstruksi, dan revitalisasi untuk memulihkan industri perikanan pasca bencana alam yang terjadi di Jepang pada tahun 2011.

Tindakan rekonstruksi, revitalisasi, dan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang terbukti berhasil dan efektif dalam mengembalikan fungsi industri perikanan di Jepang. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi industri perikanan dua tahun pasca bencana alam yang memicu terjadinya penurunan pada industri perikanan di Jepang yaitu tahun 2012. Secara finansial, nilai ekspor produksi

yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2014. Keberhasilan Pemerintah Jepang dalam industri perikanan pasca bencana alam tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, organisasi-organisasi yang terkait dalam industri perikanan, dan masyarakat (lokal dan mancanegara) dalam menjalankan ketiga rangkaian kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Anderson, James E. 2014. *Public Policymaking (Edition 8)*. Boston: Cengage Learning.

Mas’oed, Moehtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Suisancho. 2012. *Japan’s Fishery at a Glance*. Japan: Fisheries Agency.

Jurnal

Easton, David. 1957. An Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics Vol. 9 No. 3*. Dapat diakses di http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pdf. [8 Juli 2015]

Hayashi, Haruo. 2007. Long-term Recovery from Recent Disasters in Japan and the United States. *Journal of Disaster Research Vol. 2 No. 6*. Dapat diakses di <http://www.fujipress.jp/JDR/open/DSSTR000200060000.pdf>. [23 April 2014]

White Paper

Government of Japan (GoJ). 2012. *Road to recovery*. Japan: National Unit Policy. http://japan.kantei.go.jp/policy/documents/2012/_icsFiles/afieldfile/2012/03/07/road_to_recovery.pdf. [23 April 2014]

Headquarters for the Revitalization of Japan’s Food, Agriculture, Forestry and Fishery (HRJFAFF). 2011. *The Basic Policy and*

- Action Plan for the Revitalization of Japan's Food, Agriculture, Forestry and Fisheries*. Japan: Government of Japan. http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy05/pdf/20120815/20120815_en.pdf. [17 April 2014]
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). 2007. Fisheries of Japan 2006/2007 Fisheries Policy for FY 2007 Executive Summary. *FY2007 Fisheries Policy*. <http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2006.pdf>. [8 Februari 2014].
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). 2012. FY2011 Trends in Fisheries FY2012 Fishery Policy Summary. *Trends in fish and fishery product imports and exports*. Http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/pdf/2011_jfa_wp.pdf. [17 April 2014]
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). 2013. FY2012 Trends in Fisheries FY2013 Fishery Policy Summary. *Trends in fish and fishery product imports and exports*. http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/pdf/2012_jfa_wp.pdf. [23 April 2014]
- Internet**
- Directorate General for Internal Policies (DGIP). 2013. *Fisheries in Japan*. Policy Department B: Structural and Cohesion Policies European Parliament. Europa: European Union. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etude/s/note/join/2014/529044/IPOL-PECH_NT\(2014\)529044_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etude/s/note/join/2014/529044/IPOL-PECH_NT(2014)529044_EN.pdf). [23 April 2014]
- Enciclopedia, Britannica. 2014. *Japan Fauna*. UK: Britannica Enciclopedia. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/300531/Japan/23242/Fauna> [24 Mei 2014]
- Food & Water Watch (FaWW). 2011. *The Nuclear Accident in Japan: Impacts on Fish*. http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/fish_radiation.pdf. [27 Agustus 2014]
- Grainger, Richard. 2013. *Recent Trends in Global Fishery Production*. Japan: FAO Corporate Document Repository. <http://www.fao.org/>
- docrep/FIELD/006/AD7_43E/ad743e00.HTM [24 Mei 2014]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. *Pengertian Rekonstruksi*. Indonesia: Kemdikbud Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat bahasa). <http://kbbi.web.id/rekonstruksi> [18 Agustus 2014]
- Kazusa, Shuhei. 2007. *Disaster Management of Japan*. Japan: Director for Disaster Management, Cabinet Office, Government of Japan. <http://88.198.249.35/d/ DISASTER-MANAGEMENT-AND-INFORMATION.pdf>. [23 April 2015]
- Morichi, Shigeru. 2011. *Proposals on Disaster Recovery Policy for Great East Japan Earthquake (Second Stage Proposal)*. Japan: Volunteers from faculty Members (GRIPS). http://www.grips.ac.jp/docs/2011_News/urgent_proposals2_e.pdf. [23 April 2014]
- Platt, Stephen. 2015. A Decision Making Model of Disaster Resilience and Recovery. *Introduction*. Cambridge: SECED 2015 Conference. <http://www.carltd.com/sites/carwebsite/files/CAR%20Platt%20Disaster%20decision%20making.pdf>. [19 Juni 2015]
- Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana (P2MB). 2010. *Apakah Mitigasi Bencana itu?*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html. [18 Agustus 2014]